



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DESA WISATA ALAM MANDIRI DI DAERAH PESISIR (STUDI PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE DESA PENGUDANG KABUPATEN BINTAN)

Alfiandri¹, Armauliza Septiawan², Rezal Hadi Basalamah³, Nur Ilmiah Rivai⁴, Jamhur Poti⁵, Okky Rizki Azizi⁶

Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3,4,5,6}

Corresponding Author: alfiandri@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 06-11-2023

Accepted: 04-08-2024

Published: 04-08-2024

Abstrak:

Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir merupakan salah satu target program pemberdayaan desa wisata oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata tersebut, sehingga bimbingan teknis partisipasi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata alam mandiri di daerah pesisir. Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah pesisir dengan potensi wisata yang besar, memerlukan strategi pengelolaan yang berfokus pada keberlangsungan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bimbingan teknis partisipasi masyarakat dilakukan dengan metode fasilitasi pertemuan, focus group discussion, pelatihan dan bimbingan teknis, media online dan brosur cetak, sosialisasi dan promosi. Hasil yang ditemukan dari pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan mangrove adalah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), perbaikan dan pengelolaan aset wisata mangrove, pemerataan manfaat ekowisata mangrove, peningkatan perekonomian masyarakat setempat, dan penerapan Partisipasi Masyarakat sebagai aturan dalam pengelolaan lingkungan yang terkoordinasi dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi antara peserta bimbingan teknis adalah perlunya program pelatihan dan edukasi tentang nilai ekonomi dan ekologis mangrove serta teknik pengelolaannya yang benar, integrasi antara ekowisata dan pemberdayaan masyarakat, dan penerapan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai konservasi dan ekologis. Diperlukan dukungan dan kerjasama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan pada destinasi wisata mangrove.

Kata Kunci;

Partisipasi Masyarakat;

Desa Wisata Alam;

Ekowisata; Mangrove

Abstract:

Independent Nature Tourism Villages in coastal areas are one of the targets of the government's tourism village empowerment program. Community participation is very important in developing tourist villages, so technical guidance on community participation is carried out to increase community involvement in managing independent natural tourism villages in coastal areas. Bintan Regency, as a coastal area with large tourism potential, requires a management strategy that focuses on environmental, social and economic sustainability. Technical guidance for community participation is carried out using meeting facilitation methods, focus group discussions, technical training and guidance, online media and printed brochures, outreach and promotion. The results found from community empowerment in mangrove management are the formation of Tourism Awareness Groups

(POKDARWIS), improvement and management of mangrove tourism assets, equal distribution of the benefits of mangrove ecotourism, improvement of the local community's economy, and implementation of Community Participation as a rule in environmental management that is coordinated and based on participation. active community. Recommendations resulting from discussions between technical guidance participants are the need for training and education programs regarding the economic and ecological value of mangroves as well as correct management techniques, integration between ecotourism and community empowerment, and the implementation of community participation in sustainable mangrove management and upholding conservation and ecological values. . Support and cooperation between the government, private sector and the community is needed in sustainable mangrove management and paying attention to social, economic and environmental aspects to increase economic and environmental sustainability in mangrove tourist destinations.

Keyword;

*Community Participation;
Nature Tourism Village;
Ecotourism; Mangroves*

PENDAHULUAN

Desa Wisata Alam Mandiri merupakan konsep pengembangan desa wisata terkini yang bertujuan untuk membangun kemandirian desa wisata dengan memanfaatkan potensi alam setempat. Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir merupakan salah satu target yang diincar dalam program pembedayaan desa wisata oleh pemerintah (Handayani, 2019). Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir karena memiliki potensi wisata yang kaya akan sumber daya alam. Bimbingan teknis partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Khasanah, & Santosa, 2022). Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan impian, keterlibatan dan komitmen masyarakat serta penataan infrastruktur dalam pengelolaan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir.

POKDARWIS dapat membantu meningkatkan kondisi Desa Wisata Alam Mandiri dengan cara memberikan pelatihan pengelolaan wisata kepada warga lokal, membantu dalam pengembangan pariwisata lokal yang berkelanjutan, serta berpartisipasi dalam pengembangan produk pariwisata yang unik dan menarik bagi wisatawan lokal dan internasional (Pangestuti, 2020). Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, POKDARWIS memerlukan dukungan penuh dari pemerintah setempat dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata lokal dan mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan (Purwanti, 2019).

Kabupaten Bintan memiliki potensi wisata desa yang besar, namun pengelolaannya masih belum optimal. Salah satu faktornya adalah minimnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap aspek-aspek lingkungan dalam pengembangan wisata desa. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan yang memiliki fokus pada keberlangsungan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan Bimbingan Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Wisata Alam Mandiri di Daerah Pesisir adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat desa dalam mengembangkan potensi wisata alam di daerah pesisir secara mandiri (Kulandima & Lasso, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah (Handayani et al, 2022). Hal ini didasarkan pada prinsip demokratisasi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata antara lain:

- a. Adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam kegiatan pengembangan desa wisata.
- b. Adanya keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan proses pengembangan desa wisata.
- c. Terdapat kesetaraan dalam keterlibatan masyarakat. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama

dalam memberikan masukan dan pengaruh pada pengembangan desa wisata.

d. Pemerintah sebagai regulator memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Pada prinsipnya, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata harus dilakukan dalam keterlibatan aktif seluruh warga masyarakat disertai kesadaran dan komitmen serta dukungan dari pihak pemerintah setempat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pengembangan desa wisata laut versi WTO (World Tourism Organization) tahun 2004 bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan desa wisata. Sebagai bentuk kebijakan pemerintah, proses pengembangan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengembangannya. Salah satu upaya pendekatan partisipatif adalah melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Wisata Alam mandiri di daerah pesisir meliputi beberapa hal antara lain:

- a. Mengenali aspek-aspek penting dalam membangun Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir, seperti melindungi sumber daya alam, mengembangkan potensi wisata, dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
- b. Memahami tujuan dan manfaat dari pengembangan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan sumber daya alam.
- c. Menjelaskan proses pengembangan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan desa wisata.
- d. Memberikan contoh-contoh sukses pengembangan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir dan memberikan masukan dan saran untuk pengembangan desa wisata.

Bimbingan teknis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Dengan adanya bimbingan teknis, diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam membangun Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan desa wisata alam mandiri, serta meningkatkan kualitas produk wisata yang ditawarkan. Selain itu, bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan desa wisata alam mandiri yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Hal ini juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat, serta melestarikan lingkungan alam di daerah pesisir.

METODE

Bimbingan teknis partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir di Kabupaten Bintan dilakukan dengan beberapa metode meliputi:

- a. Fasilitasi pertemuan dengan masyarakat setempat untuk membahas potensi wisata dan pemetaan potensi wisata alam di daerah tersebut.
- b. Mengadakan focus group discussion dengan masyarakat setempat (Nyumba et al, 2018).
- c. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk seluruh masyarakat terkait (Rickards, 1999).
- d. Memberikan informasi terkait pengembangan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir melalui media online dan brosur cetak.
- e. Melakukan sosialisasi dan promosi terkait pengembangan Desa Wisata Alam Mandiri di daerah pesisir melalui berbagai media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan teknis Ekowisata Berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan, telah menghasilkan berbagai kegiatan dan manfaat yang positif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan mangrove. Beberapa hasil kegiatan yang dapat disebutkan antara lain:

1. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Mangrove; Dalam kegiatan bimbingan teknis ini telah terbentuk Pokdarwis Mangrove, yang terdiri dari warga lokal yang peduli dengan kelestarian mangrove dan memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi ekowisata di daerah mereka. Pokdarwis Mangrove ini telah dilatih dan diberikan pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan mangrove dan mengembangkan produk wisata berbasis ekowisata. Mereka mulai menyediakan tour untuk mengajak wisatawan melihat keindahan mangrove, melakukan kayak, menikmati pemandangan danau, serta berjalan-jalan di jembatan kayu khusus yang dibangun di atas air. Selain itu, mereka juga menjual produk-produk souvenir seperti kain tenun, kerajinan tangan dari limbah mangrove, dan makanan ringan dari hasil olahan mangrove. Pokdarwis Mangrove ini terus berupaya dalam menjaga kelestarian mangrove serta mendukung perekonomian masyarakat sekitar dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan ekowisata.
2. Pengelolaan dan Perbaikan Aset Wisata Mangrove; Sebagai upaya mendukung pengembangan ekowisata berbasis mangrove, Bimbingan Teknis ini juga dilakukan perbaikan dan peningkatan aset wisata mangrove. Aspek-aspek yang diperbaiki antara lain infrastruktur, fasilitas, dan penataan serta penataan kawasan mangrove. Infrastruktur yang diperbaiki mencakup jalan akses menuju kawasan mangrove, jalur-jalur pengunjung di dalam kawasan, dan jembatan-jembatan kayu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Fasilitas yang ditingkatkan meliputi adanya tempat parkir kendaraan, toilet, tempat cuci tangan, tempat duduk, dan tempat memasak bagi pengunjung yang ingin berlibur di kawasan mangrove. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk merawat dan menjaga keaslian kawasan mangrove sebagai objek wisata. Hal ini meliputi kegiatan penanaman mangrove, pembersihan sampah yang ada di kawasan, dan perbaikan habitat penyu atau satwa lainnya yang hidup di mangrove. Dengan perbaikan dan peningkatan aset wisata mangrove ini, diharapkan wisatawan akan semakin tertarik untuk berkunjung dan melihat keindahan serta keanekaragaman hayati yang ada di kawasan mangrove. Peningkatan jumlah pengunjung diharapkan akan mendorong perkembangan ekonomi lokal melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar yang terlibat dalam usaha ekowisata mangrove.
3. Pemerataan Manfaat Ekowisata Mangrove; Dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata mangrove, Pokdarwis Mangrove telah menerapkan prinsip pemerataan manfaat. Dalam hal ini, masyarakat desa terlibat secara aktif sebagai penyedia jasa, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Pokdarwis Mangrove juga memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ekowisata mangrove memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak, termasuk masyarakat setempat. Selain itu, Pokdarwis Mangrove juga mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk masyarakat desa, seperti pelatihan pengelolaan homestay, pelatihan pemandu wisata, pelatihan menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan menerapkan prinsip pemerataan manfaat, Pokdarwis Mangrove berhasil menciptakan lingkungan yang ramah kepada wisatawan dan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ekowisata mangrove yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Mangrove juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, prinsip pemerataan manfaat harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata mangrove maupun kegiatan ekowisata lainnya.
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat; Dengan adanya kegiatan ekowisata mangrove, masyarakat desa dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui penyediaan jasa dan produk yang berkaitan dengan wisata mangrove. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Ekowisata mangrove dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat desa. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan pendapatan: Dengan adanya ekowisata mangrove, masyarakat desa dapat menawarkan jasa seperti pemandu wisata, penyewaan perahu, atau penginapan. Masyarakat juga dapat menjual produk seperti kerajinan tangan atau makanan khas mangrove. Pendapatan tambahan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Penciptaan lapangan kerja: Pengembangan ekowisata mangrove akan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat di desa tersebut. Setiap jasa atau produk yang berkaitan dengan

wisata mangrove membutuhkan tenaga kerja lokal. Hal ini akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, terutama yang mungkin sebelumnya menganggur atau bekerja di sektor ekonomi yang tidak stabil.

- Pengembangan usaha mikro: Dengan adanya ekowisata mangrove, masyarakat desa juga dapat mengembangkan usaha mikro mereka. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi seperti kerajinan tangan atau makanan khas mangrove. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing produk lokal dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha mereka.
- Diversifikasi ekonomi: Masyarakat desa yang sebelumnya mengandalkan sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, dapat mendiversifikasikan mata pencaharian mereka melalui ekowisata mangrove. Diversifikasi ini akan membantu mengurangi risiko ekonomi dan memberikan stabilitas pendapatan bagi masyarakat desa.
- Peningkatan infrastruktur lokal: Pengembangan ekowisata mangrove juga akan mendorong peningkatan infrastruktur lokal di desa tersebut. Misalnya, terdapat kemungkinan pembangunan atau perbaikan jalan, perbaikan sarana sanitasi, atau perluasan akses listrik. Infrastruktur yang lebih baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, kegiatan ekowisata mangrove memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam implementasinya, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat desa, dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat maksimal dari pengembangan ekowisata mangrove ini.

Dengan demikian, hasil kegiatan Bimbingan Teknis Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Pengudang Kabupaten Bintan telah memberikan manfaat yang positif bagi pengelolaan mangrove, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Semoga hasil dari kegiatan tersebut dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih besar untuk lingkungan dan masyarakat setempat. Diharapkan juga adanya dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi melalui praktik ekowisata berbasis Partisipasi Masyarakat.

a. Diskusi antar Peserta Bimbingan Teknis

Diskusi antar peserta bimbingan teknis tentang ekowisata berbasis Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan mangrove di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan, menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

1. Perlu adanya program pelatihan dan edukasi bagi masyarakat tentang nilai ekonomi dan ekologis mangrove serta teknik pengelolaan yang benar. Program pelatihan dan edukasi tentang nilai ekonomi dan ekologis mangrove serta teknik pengelolaan yang benar penting dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mangrove bagi lingkungan hidup dan ekonomi mereka. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari mangrove antara lain sebagai penyeimbang ekosistem, tempat hidup ikan dan binatang air lainnya, sarana pengendalian erosi, dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, mangrove masih sering diperlakukan tidak benar oleh masyarakat sekitar, seperti dengan memotongnya untuk digunakan sebagai kayu bakar ataupun mencari hewan laut di dalamnya dengan merusak ekosistem. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menjaga kelestarian mangrove dan mengelolanya dengan benar. Program pelatihan dan edukasi tersebut bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan langsung di lapangan. Selain itu, juga bisa dilakukan melalui distribusi materi edukatif seperti buku, brosur, atau video tentang nilai ekonomi dan ekologis mangrove serta teknik pengelolannya yang benar. Dengan adanya program pelatihan dan edukasi ini, diharapkan masyarakat sekitar dapat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian mangrove dan mengelolanya dengan benar untuk keberlangsungan hidup dan penghidupan mereka. Selain itu, dengan memahami nilai ekonomi mangrove, masyarakat pun bisa mengembangkan potensi ekonomi dari sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan.

2. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan mangrove, termasuk melalui pembentukan kelompok masyarakat pengelola mangrove (KMPM) dan partisipasi dalam mekanisme pengawasan dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan mangrove sangat penting karena mangrove memiliki banyak manfaat yang sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Beberapa manfaat dari mangrove antara lain:
 - Menjaga kualitas air: Mangrove berperan dalam menjaga kualitas air karena dapat menyerap limbah yang terdapat di air dan menahan partikel-partikel padat. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran air.
 - Meningkatkan produktivitas laut: Mangrove sebagai tempat hidup bagi berbagai spesies laut seperti ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya mangrove akan meningkatkan produktivitas laut dan sebagai sumber penghidupan bagi nelayan.
 - Menjaga pantai dari erosi: Mangrove berfungsi sebagai tempat penangkal abrasi, membantu menjaga kestabilan garis pantai dan mencegah terjadinya erosi yang parah.
 - Mengurangi dampak bencana alam: Mangrove dapat berfungsi sebagai tameng alami yang dapat mengurangi dampak bencana alam seperti tsunami, badai, dan sebagainya.

Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengelolaan mangrove, termasuk melalui pembentukan KMPM dan partisipasi dalam mekanisme pengawasan dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam menjaga keberlangsungan mangrove dengan melakukan pengawasan terhadap penebangan hutan mangrove yang tidak diizinkan oleh pemerintah, mengadakan kegiatan rehabilitasi dan pencegahan kerusakan serta melakukan inovasi teknologi pembudidayaan mangrove sebagai alternatif pendapatan dan sumber kehidupan baru. Dengan begitu, mangrove dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat dan alam.
3. Diperlukan integrasi antara ekowisata dan pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan homestay dan usaha ekonomi kreatif lainnya yang berbasis mangrove. Integrasi antara ekowisata dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta melestarikan dan mempromosikan wisata alam yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah dengan pengembangan homestay atau penginapan yang dikelola oleh masyarakat pribumi sebagai tempat tinggal bagi para wisatawan. Selain itu, pengembangan usaha ekonomi kreatif lainnya seperti produksi kerajinan tangan atau kuliner yang berbasis mangrove juga dapat memberikan peluang ekonomi serta edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, masyarakat akan merasa terlibat serta memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan kelestarian mangrove sebagai daya tarik wisata. Integrasi antara ekowisata dan pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar dalam hal pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip ekowisata (Kholek et al., 2023). Hal ini akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, integrasi antara ekowisata dan pemberdayaan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan lingkungan pada destinasi wisata mangrove.
4. Perlu adanya kajian mendalam mengenai keberlanjutan dan dampak ekowisata berbasis mangrove bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai suatu bentuk pariwisata, ekowisata berbasis mangrove dianggap sebagai salah satu model yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, perlu adanya kajian mendalam mengenai keberlanjutan dan dampak ekowisata tersebut dalam jangka panjang. Pertama-tama, kajian mengenai keberlanjutan ekowisata berbasis mangrove harus memfokuskan pada aspek lingkungan. Pemanfaatan wilayah mangrove yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak pada hilangnya sumber daya hayati seperti ikan, kepiting, dan udang. Kajian juga perlu melihat dampak jangka panjang dari kegiatan ekowisata terhadap kualitas air dan peningkatan emisi karbon dioksida. Selain aspek lingkungan, kajian tentang

keberlanjutan ekowisata berbasis mangrove juga seharusnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Pertama-tama, kajian harus mempertimbangkan bagaimana ekowisata tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kajian juga harus memperhatikan ketidakpastian kerja dan gangguan pada tradisi lokal yang mungkin terjadi sebagai dampak dari kegiatan ekowisata tersebut. Kajian tentang keberlanjutan ekowisata berbasis mangrove seharusnya dilakukan melalui pendekatan partisipatif, dimana masyarakat lokal dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekowisata tersebut memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam kesimpulannya, perlu adanya kajian mendalam mengenai keberlanjutan dan dampak ekowisata berbasis mangrove bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kajian tersebut harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, ekowisata berbasis mangrove dapat menjadi salah satu model pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

5. Diperlukan dukungan dan kerjasama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Ketiga pihak ini harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan, regulasi, dan perlindungan mangrove. Mereka harus mendorong kebijakan dan peraturan yang melindungi dan menjaga ekosistem mangrove. Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian mangrove. Selain itu, pemerintah harus memiliki tim yang kompeten dalam pengelolaan dan pemantauan mangrove. Swasta juga memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan mangrove. Perusahaan dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang meliputi pelestarian mangrove. Mereka dapat memberikan dana, teknologi, dan tenaga kerja untuk membantu dalam pengelolaan dan pemulihan mangrove. Selain itu, swasta juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan tentang mangrove dan memperkenalkan praktik pengelolaan terbaik. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengelolaan mangrove. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman tentang penggunaan mangrove dan ekosistemnya. Mereka dapat memberikan masukan berharga dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan mangrove. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove dan partisipasi mereka dalam kegiatan restorasi dan pelestarian juga sangat penting. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah melalui pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan semua pihak terkait. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengatasi masalah terkait pengelolaan mangrove. Secara keseluruhan, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan pelestarian mangrove yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
6. Perlu adanya penerapan Partisipasi Masyarakat untuk mengatur pengelolaan mangrove yang terkoordinasi dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat serta menjunjung tinggi nilai konservasi dan ekologis. Partisipasi Masyarakat yang diterapkan pada pengelolaan mangrove harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup yang seimbang dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Hal ini harus dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan mangrove. Selain itu, Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan mangrove harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru serta mendukung upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, penerapan Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan mangrove dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- Pembentukan forum partisipasi masyarakat untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program pengelolaan mangrove, termasuk dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan mangrove.
- Pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi aktor utama dalam pengelolaan mangrove dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis.
- Menjalin kemitraan antara pihak swasta dan pemerintah dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan mangrove.
- Mendorong penggunaan teknologi hijau dalam pengelolaan mangrove dengan tepat guna.
- Penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar dalam pengelolaan mangrove.

Dalam jangka panjang, penerapan Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan mangrove diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan konservasi mangrove, meningkatkan keberlangsungan hidup ekosistem dan meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat dalam basis ekonomi yang lestari.

7. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu memperhatikan kesetaraan gender serta mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang tersedia, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau latar belakang sosial dan budaya. Selain itu, memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal juga penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dari awal dalam proses perencanaan dan implementasi program sangat diperlukan, sehingga dapat memastikan bahwa program tersebut relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana pengelolaan mangrove dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun lingkungan secara luas.

b. Pemahaman Materi oleh Peserta Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis ekowisata berbasis Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan mangrove di Desa Pengudang Kabupaten Bintan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam mengelola potensi ekowisata di area mangrove. Peserta dipandu untuk memahami konsep Partisipasi Masyarakat atau tata kelola yang ramah lingkungan dalam upaya melestarikan mangrove yang menjadi ekosistem penting sebagai kawasan penahan tsunami dan habitat beragam spesies fauna laut. Peserta juga dilatih untuk memahami pentingnya ekowisata sebagai alternatif untuk memperoleh penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar area mangrove.

Melalui bimbingan teknis ini, peserta didorong untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekowisata di area mangrove yang dapat memberikan manfaat lokal, seperti pengembangan desa wisata atau pelatihan homestay bagi masyarakat setempat. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan pengembangan ekowisata di desa mereka. Dengan demikian, peserta akan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat setempat dan menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.

c. Wawasan Peserta Bimbingan Teknis

Peserta bimbingan teknis ekowisata berbasis Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan mangrove di Desa Pengudang Kabupaten Bintan diharapkan memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peserta diharapkan memahami konsep ekowisata, Partisipasi Masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sebagai landasan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari. Peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola ekowisata berbasis

masyarakat dan memahami pentingnya pengelolaan mangrove dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan manusia.

Selain itu, mereka diharapkan bisa mengaplikasikan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan ekowisata dan mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjalankan program pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan peserta bisa menjadi agen perubahan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan alam sekitar. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan dan efektif. Mereka juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan mangrove. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dengan pengelolaan mangrove yang baik dan berkelanjutan, akan tercipta lapangan kerja baru dalam bidang pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, maka diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekowisata Mangrove

Ekowisata mangrove di Desa Pengudang Kabupaten Bintan telah memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat setempat. Melalui pengembangan ekowisata, penduduk Desa Pengudang dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, ekowisata mangrove juga membantu dalam pelestarian lingkungan dan mempromosikan kesadaran lingkungan di antara masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat dalam ekowisata mangrove dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Pelatihan dan pembinaan; Masyarakat setempat diberikan pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan ekowisata, termasuk manajemen dan pemasaran. Pelatihan ini membantu masyarakat untuk memahami industri ekowisata, menumbuhkan sikap kerja sama dan keterampilan pengelolaan wisata, serta meningkatkan kualitas layanan yang disediakan.
2. Keterlibatan masyarakat; Masyarakat setempat terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pemeliharaan fasilitas wisata yang ada. Hal ini membantu mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
3. Pengembangan produk ekowisata; Masyarakat setempat didorong untuk mengembangkan produk-produk ekowisata yang berbasis pada kearifan lokal, seperti kerajinan tangan dari bahan daur ulang dan kuliner khas daerah. Ini membantu memperluas peluang penghasilan masyarakat setempat.
4. Peningkatan aksesibilitas; Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, infrastruktur dan fasilitas di sekitar lokasi ekowisata harus ditingkatkan. Hal ini akan memudahkan para wisatawan berkunjung dan juga memperlebar kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekowisata.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat, ekowisata mangrove di Desa Pengudang Kabupaten Bintan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang merajut kesadaran lingkungan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengajak mereka untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove, seperti membuat program edukasi lingkungan untuk wisatawan, pembuatan souvenirs dari bahan daur ulang, dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk wisata seperti jalan setapak, jembatan kayu, serta peningkatan kemudahan akses untuk wisatawan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove, maka mereka akan memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hal ini akan berdampak positif pada upaya pelestarian lingkungan di area tersebut.

Selain itu, pengembangan ekowisata mangrove juga dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pariwisata, masyarakat dapat berperan sebagai pemandu wisata, penjual souvenir, atau bahkan membuka usaha kuliner yang berbasis produk lokal. Hal ini akan meningkatkan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat serta mengurangi tekanan penggunaan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Desa Pengudang Kabupaten Bintan dapat menjadi solusi yang baik dalam mengembangkan sumber penghasilan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dalam bimbingan teknis Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat yang dilakukan di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan, ditemukan banyak kegiatan dan manfaat positif yang berasal dari pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan mangrove. Beberapa hasil kegiatan tersebut adalah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Mangrove (Pokdarwis Mangrove), perbaikan dan pengelolaan aset wisata mangrove, pemerataan manfaat ekowisata mangrove, peningkatan perekonomian masyarakat setempat, dan penerapan Partisipasi Masyarakat sebagai aturan dalam pengelolaan lingkungan yang terkoordinasi dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat.

Dalam diskusi antara peserta bimbingan teknis, beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain perlunya program pelatihan dan edukasi tentang nilai ekonomi dan ekologis mangrove serta teknik pengelolaannya yang benar, perlu adanya integrasi antara ekowisata dan pemberdayaan masyarakat, dan perlunya penerapan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan mangrove yang terkoordinasi dan menjunjung tinggi nilai konservasi dan ekologis.

Pemberdayaan masyarakat dalam ekowisata mangrove juga diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan pada destinasi wisata mangrove. Diperlukan adanya dukungan dan kerjasama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kesetaraan gender dan mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal harus dipertimbangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk ekowisata mangrove yang sukses dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada LPPM UMRAH yang telah membiaya kegiatan PKM-UP Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, D. W. (2019). Pemberdayaan Bagi Tokoh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah Di Desa Wisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Perempuan Dan Anak. In *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019* (pp. 158-171). LPPM Universitas Lampung.
- Handayani, K., Sulistyadi, Y., & Hasibuan, B. (2022). Optimalisasi Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Wangi-Wangi. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 1, pp. 7-29).
- Khasanah, U. R., & Santosa, S. A. Implementasi Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 176-191.
- Kholek, A., Abror, M. Y., Elake, G. L., & Akbar, D. T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Mangrove In Action Di Dusun Sembilang Desa Sungsang IV Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(9), 1885-1892.
- Kulandima, R. U. L., & Lasso, A. H. (2023). Partisipasi Masyarakat Desa Tuafanu Dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 119-131.

- Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32.
- Pangestuti, A. (2020). Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Membina Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) The Caretaker (Studi Kasus: Pengembangan Objek Wisata Suligi Hill) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Purwanti, I. (2019). Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Penguatan Desa Wisata. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 101–107.
- Rickards, T. (1999). Brainstorming Revisited: A Question of Context. *International Journal of Management Reviews*, 1(1), 91–110.
- Wahyudi, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. *Kutubkhanah*, 15(2), 105–116.
- Widyasari, N. K. P., Swabawa, A. A. P., & Budiarta, I. P. (2023). Penanganan BIMTEK untuk Pengembangan Desa Wisata (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Yasir, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Based Tourism (CBT) Dalam Mewujudkan Desa Wisata Koto Sentajo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(4), 352-360.